

## Enhancing Community Participation in Village Planning : Cahaya Negeri Case Study

**Yorry Hardayani\*, Jatmiko Yogopriyatno**

Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera,  
Bengkulu, 38371, Indonesia

Email: \*[yhardayani@unib.ac.id](mailto:yhardayani@unib.ac.id), [jyogop@unib.ac.id](mailto:jyogop@unib.ac.id)

---

Article history	
Received	: 25/03/2025
Received in revised form	: 23/03/2025
Accepted	: 20/04/2025

---

**Abstract :** *This community service activity aimed to strengthen participatory planning processes in Cahaya Negeri Village, Seluma Regency. Lack of community participation in development planning has resulted in programs that are less responsive to local needs and aspirations. The service implemented a three-pronged approach: raising community awareness about the importance of participation, building capacity in communication and decision-making skills, and facilitating participatory planning processes through Focus Group Discussions. The implementation used Participatory Rural Appraisal (PRA) and Community Development models. Results showed increased community awareness regarding their role in village development planning, improved communication skills among participants, and more active engagement in development planning forums. The participatory approach fostered greater community ownership over development programs and improved relations between village administrators and residents. This initiative demonstrates how a well-designed participatory planning facilitation can enhance local democracy, strengthen village governance, and contribute to more sustainable rural development.*

**Keywords:** *Capacity building; community participation; participatory planning; rural development; village governance*

**Abstrak :** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat proses perencanaan partisipatif di Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Seluma. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mengakibatkan program-program yang kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Pengabdian ini menerapkan pendekatan tiga arah: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, membangun kapasitas dalam keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan, dan memfasilitasi proses perencanaan partisipatif melalui Diskusi Kelompok Terarah. Implementasi menggunakan model Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Community Development. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam perencanaan pembangunan desa, peningkatan keterampilan komunikasi di antara peserta, dan keterlibatan yang lebih aktif dalam forum perencanaan pembangunan. Pendekatan partisipatif menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih besar terhadap program pembangunan dan memperbaiki hubungan antara administrator desa dan penduduk. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana fasilitasi perencanaan partisipatif yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan demokrasi lokal, memperkuat tata kelola desa, dan berkontribusi pada pembangunan pedesaan yang lebih berkelanjutan.

**Kata kunci:** Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Partisipatif; Pembangunan Pedesaan, Pengembangan Kapasitas; Tata Kelola Desa

## **PENDAHULUAN**

Secara hierarki, desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam konteks pemberian layanan dan proses pembangunan. Desa sebagai wilayah otonom memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berskala desa, mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat (Setyawan et al., 2018; Soleh, 2017, 2019).

Perencanaan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang berpartisipasi (Aguswan & Mirad, 2018; Bihamding, 2019; Prayitno, 2022). Pendekatan ini menjadi tolok ukur penting dalam tahapan pembangunan desa, karena melibatkan masyarakat dalam kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda, hingga penyusunan regulasi desa (Aguswan & Mirad, 2018; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Yogopriyatno Jatmiko et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunannya sendiri. Dalam konteks ini, perencanaan partisipatif menjadi sangat penting karena dapat memastikan bahwa program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Husmayanti, 2021a, 2021b; Laily & Imro'atin, 2015). Namun demikian, masih banyak desa yang belum optimal dalam menerapkan perencanaan partisipatif, termasuk Desa Cahaya Negeri di Kabupaten Seluma.

Hasil penelitian (Mustanir et al., 2020) menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif yang efektif dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan desa. Selanjutnya, (Putri, 2022) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberlanjutan program tersebut. Sementara itu, (Setiawan, 2019) menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan partisipatif untuk

memastikan bahwa semua kelompok, termasuk perempuan dan kelompok marginal, dapat berpartisipasi secara efektif.

Desa Cahaya Negeri menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Observasi awal menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) masih rendah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas partisipasi. Data hasil observasi awal yang dilakukan tim pengabdian masyarakat disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Observasi Awal Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Desa Cahaya Negeri**

No	Aspek Partisipasi	Kondisi Awal	Persentase (%)
1	Kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes	25 dari 150 undangan	16,7
2	Keterlibatan perempuan	8 dari 25 peserta hadir	32,0
3	Keterlibatan kelompok marginal (disabilitas, lansia, masyarakat miskin)	2 dari 25 peserta hadir	8,0
4	Peserta yang aktif berbicara/mengusulkan ide	7 dari 25 peserta hadir	28,0
5	Usulan yang disampaikan oleh masyarakat biasa (bukan perangkat atau tokoh)	3 dari 15 total usulan	20,0
6	Pemahaman peserta tentang proses perencanaan	12 dari 45 sampel wawancara	26,7

Sumber: Data Observasi Tim Pengabdian, 2024.

Desa Cahaya Negeri di Kabupaten Seluma menghadapi permasalahan serius dalam hal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan tim pengabdian masyarakat, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat rendah, dengan tingkat kehadiran hanya mencapai 16,7% (25 dari 150 undangan). Permasalahan ini diperparah dengan minimnya keterlibatan perempuan (32% dari peserta yang hadir) dan kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin (hanya 8% dari peserta yang hadir).

Selain rendahnya tingkat kehadiran, kualitas partisipasi juga menjadi masalah serius di Desa Cahaya Negeri. Dari peserta yang hadir dalam Musrenbangdes, hanya 28% (7 dari 25 orang) yang aktif berbicara atau mengusulkan ide. Lebih memprihatinkan lagi, usulan yang disampaikan oleh masyarakat biasa (bukan perangkat atau tokoh desa) hanya 20% (3 dari 15 total usulan). Kondisi ini mencerminkan dominasi elit desa dalam pengambilan

keputusan, yang berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan menjadi akar permasalahan, dimana hanya 26,7% dari sampel yang diwawancarai memiliki pemahaman yang memadai. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam perencanaan pembangunan desa. Akibatnya, program-program pembangunan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga tingkat keberhasilan dan keberlanjutan program menjadi rendah.

Kondisi di Desa Cahaya Negeri memerlukan penanganan segera mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif. Hasil penelitian Mustanir et al. (2020) menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif yang efektif dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan desa. Selanjutnya, Putri (2022) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan keberlanjutan program tersebut.

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi berupa fasilitasi perencanaan partisipatif yang komprehensif. Solusi ini mencakup serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas, meliputi: (1) pelatihan perencanaan partisipatif bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat, (2) sosialisasi pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan kepada seluruh elemen masyarakat, (3) pendampingan teknis dalam pelaksanaan Musrenbangdes dengan pendekatan partisipatif, dan (4) pembentukan forum warga sebagai wadah aspirasi yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Cahaya Negeri melalui fasilitasi perencanaan partisipatif. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan partisipatif, (2) meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan partisipatif, (3) meningkatkan keterlibatan perempuan dan

kelompok marginal dalam proses perencanaan pembangunan desa, dan (4) menghasilkan dokumen perencanaan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen masyarakat. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, diharapkan dapat terwujud tata kelola desa yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan di Desa Cahaya Negeri.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Seluma dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan metodologis untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dan efektivitas program. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup:

### **a) Model Pendekatan**

- (1) **Participatory Rural Appraisal (PRA)** Model ini menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. PRA memungkinkan masyarakat untuk menganalisis kondisi mereka sendiri, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi dengan didampingi oleh fasilitator dari tim pengabdian (Chambers, 2014).
- (2) **Community Development** Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subjek dan objek pelaksanaan kegiatan. Community Development berfokus pada pengembangan potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri (Ife, 2014).
- (3) **Pendekatan Persuasif** Pendekatan ini bersifat himbauan dan dukungan tanpa unsur paksaan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan. Metode persuasif penting untuk membangun kesadaran dan motivasi intrinsik dari masyarakat (Agustina et al., 2019).
- (4) **Pendekatan Edukatif** Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman sebagai ciri pemberdayaan masyarakat (Sondakh et al., 2021).

### **b) Tahapan Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cahaya Negeri dilaksanakan melalui tahapan terintegrasi, dimulai dengan persiapan berupa koordinasi intensif dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, pemetaan stakeholder untuk

mengidentifikasi aktor kunci termasuk kelompok perempuan, pemuda, petani, dan kelompok marginal, serta penyusunan materi pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat. Tahap pelaksanaan mencakup pelatihan interaktif tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan, workshop pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan, FGD untuk identifikasi masalah dan kebutuhan pembangunan, serta pendampingan dalam simulasi musyawarah desa.

Tahap akhir program meliputi evaluasi dan monitoring dengan pengukuran tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan, penilaian peningkatan kapasitas melalui observasi, wawancara, dan kuesioner self-assessment, serta evaluasi keseluruhan program bersama masyarakat dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil evaluasi, tim pengabdian menyusun rekomendasi untuk keberlanjutan program dan penguatan perencanaan partisipatif di Desa Cahaya Negeri, memastikan intervensi memberikan fondasi kokoh bagi transformasi jangka panjang dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Alur tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.** Alur tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

### c) Metode Pengumpulan Data

Tim pengabdian menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memastikan efektivitas kegiatan, meliputi observasi partisipatif dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas masyarakat, wawancara mendalam dengan tokoh kunci seperti kepala desa dan perangkat desa, Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali informasi dari berbagai kelompok masyarakat termasuk

perempuan dan pemuda, serta kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang perencanaan partisipatif.

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan indikator-indikator berikut: peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas masyarakat dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, peningkatan jumlah dan kualitas partisipasi dalam forum perencanaan pembangunan, serta terbangunnya mekanisme perencanaan partisipatif yang berkelanjutan di Desa Cahaya Negeri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Kondisi Awal Desa Cahaya Negeri**

Desa Cahaya Negeri di Kabupaten Seluma memiliki potensi sumber daya yang baik namun menghadapi masalah pembangunan partisipatif yang ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Dari 150 undangan Musrenbangdes, hanya 16,7% yang hadir dengan keterwakilan perempuan hanya 32% dan kelompok marginal 8%, sementara kualitas partisipasi juga rendah dimana hanya 28% peserta yang aktif menyampaikan usulan, dengan dominasi perangkat dan tokoh desa dalam pengambilan keputusan.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan menjadi salah satu faktor penyebab, dimana hanya 26,7% dari 45 sampel yang memahami proses tersebut, sementara mayoritas menganggap perencanaan adalah urusan pemerintah desa semata. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara program pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok perempuan dan marginal, yang berujung pada rendahnya tingkat kepuasan dan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

#### **1) Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Fasilitasi Perencanaan Partisipatif di Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Seluma" telah dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga evaluasi. Berikut ini adalah hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Fasilitasi Perencanaan Partisipatif di Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Seluma" telah dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga evaluasi. Berikut ini adalah hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut:

**a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Sebelum kegiatan dilaksanakan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa masih rendah. Berdasarkan hasil pre-test yang diberikan kepada 45 peserta, hanya 27% peserta yang memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dan sosialisasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 86% peserta yang memahami pentingnya partisipasi mereka.

Perubahan kesadaran ini juga terlihat dari peningkatan kehadiran masyarakat dalam forum-forum diskusi desa. Pada awal kegiatan, rata-rata kehadiran masyarakat dalam forum diskusi hanya sekitar 15-20 orang, namun pada akhir program, jumlah tersebut meningkat menjadi 35-40 orang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa suara mereka penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Dua peserta, Bapak Sutrisno (58 tahun) dan Ibu Mariani (45 tahun), mengatakan:

"Selama ini saya pikir perencanaan pembangunan adalah urusan pemerintah desa saja. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya baru sadar bahwa pendapat kami juga penting untuk didengarkan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

"Sebelumnya saya malu untuk berbicara di depan umum, apalagi mengusulkan ide. Sekarang saya lebih percaya diri dan tahu bagaimana cara menyampaikan usulan yang efektif dalam musyawarah desa."

Kegiatan pengabdian masyarakat telah berhasil mentransformasi kesadaran warga dengan mengubah paradigma pembangunan desa menjadi proses kolaboratif yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah desa semata. Program ini terbukti efektif meningkatkan kapasitas personal warga, terutama dalam hal kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi, yang ditandai dengan perubahan signifikan dari sikap malu berbicara di forum publik menjadi berani menyampaikan gagasan dalam musyawarah desa, mencerminkan peningkatan kesadaran

partisipatif yang akan mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Data perubahan kesadaran masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Perubahan Kesadaran Masyarakat Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Aspek Kesadaran	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan	27	86	59
2	Pengetahuan tentang mekanisme Musrenbangdes	35	92	57
3	Kesadaran hak menyampaikan pendapat dalam forum desa	42	89	47
4	Pemahaman peran masyarakat dalam monitoring program desa	18	75	57
5	Kesadaran pentingnya keterlibatan kelompok marginal	23	81	58
6	Pemahaman tentang alokasi anggaran desa	15	68	53

Sumber: Data Evaluasi Kegiatan Pengabdian, 2024

Tabel 2 menunjukkan transformasi signifikan dalam kesadaran masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024, dengan peningkatan dramatis dari kondisi awal yang rendah (15-42%) menjadi jauh lebih tinggi di semua aspek dengan kenaikan rata-rata lebih dari 50%. Peningkatan tertinggi terlihat pada pemahaman pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan (59%) dan keterlibatan kelompok marginal (58%), dengan capaian paling mengesankan pada pengetahuan tentang mekanisme Musrenbangdes yang mencapai 92%. Meskipun demikian, pemahaman tentang alokasi anggaran desa tetap menjadi capaian terendah (68%) meski mengalami peningkatan, menunjukkan perlunya pendampingan lebih intensif pada aspek pengelolaan keuangan desa, dengan tantangan ke depan adalah mengimplementasikan kesadaran baru ini dalam praktik nyata partisipasi di forum-forum desa dan proses pengambilan keputusan pembangunan.

#### **b) Peningkatan Kapasitas dalam Keterampilan Partisipasi**

Program pengembangan kapasitas yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat dalam komunikasi, negosiasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, dengan perubahan signifikan terutama pada perempuan dan kelompok marginal yang sebelumnya tidak percaya diri berbicara di forum publik. Melalui workshop yang melatih peserta untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara sistematis,

berkomunikasi efektif dalam forum publik, bernegosiasi untuk mencapai konsensus, serta menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dan realistis, hasil evaluasi menunjukkan 78% peserta melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat di forum publik, dan 65% menyatakan telah menerapkan keterampilan negosiasi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Data peningkatan kapasitas masyarakat dalam keterampilan partisipasi disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Keterampilan Partisipasi**

No	Jenis Keterampilan	Jumlah Peserta yang Menunjukkan Peningkatan	Persentase (%)
1	Kepercayaan diri berbicara di forum publik	35 dari 45 peserta	78
2	Kemampuan mengidentifikasi masalah secara sistematis	38 dari 45 peserta	84
3	Keterampilan negosiasi dan mencapai konsensus	29 dari 45 peserta	65
4	Kemampuan menyusun rencana aksi	32 dari 45 peserta	71
5	Keterampilan presentasi dan argumentasi	30 dari 45 peserta	67
6	Kemampuan analisis dan prioritas masalah	33 dari 45 peserta	73

Sumber: Data Evaluasi Kegiatan Pengabdian, 2024

Tabel 3 menunjukkan peningkatan signifikan pada enam keterampilan partisipasi masyarakat setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Dari 45 peserta, keterampilan dengan peningkatan tertinggi adalah kemampuan mengidentifikasi masalah secara sistematis (84%) dan kepercayaan diri berbicara di forum publik (78%), sementara keterampilan negosiasi dan mencapai konsensus menunjukkan peningkatan terendah (65%). Data ini mengindikasikan bahwa peserta lebih cepat mengembangkan keterampilan analitis dan personal dibandingkan keterampilan yang melibatkan interaksi interpersonal.

Secara keseluruhan, program pengabdian telah berhasil meningkatkan kapasitas mayoritas peserta dengan rata-rata peningkatan di atas 70% pada berbagai keterampilan partisipasi. Kemampuan menyusun rencana aksi yang mencapai 71% menunjukkan kesiapan peserta untuk mengimplementasikan pemahaman teoretis menjadi langkah praktis, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek keterampilan komunikasi strategis seperti negosiasi dan presentasi. Peningkatan berbagai keterampilan ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

### c) Fasilitasi Proses Perencanaan Partisipatif

Tim pengabdian telah memfasilitasi lima sesi FGD dengan berbagai kelompok masyarakat (perempuan, pemuda, petani, dan kelompok marginal) dengan rata-rata 20 peserta per sesi, yang menghasilkan identifikasi 15 permasalahan prioritas dalam bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Melalui proses ini, tersusun daftar prioritas kebutuhan pembangunan berdasarkan urgensi dan dampaknya, serta rencana aksi untuk lima program prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbangdes.

Lima program prioritas yang dihasilkan meliputi perbaikan infrastruktur irigasi untuk pertanian, pengembangan BUMDes untuk pengelolaan hasil pertanian, peningkatan akses layanan kesehatan dasar, program pelatihan keterampilan bagi pemuda desa, serta pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan. Penentuan prioritas ini dilakukan secara demokratis melalui mekanisme voting dan deliberasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya kelompok mayoritas. Data hasil fasilitasi proses perencanaan partisipatif disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Identifikasi Permasalahan dan Program Prioritas melalui FGD**

No	Bidang	Permasalahan Teridentifikasi	Program Prioritas	Kelompok Pengusul
1	Infrastruktur	4 masalah (jalan rusak, irigasi tidak memadai, jembatan perlu perbaikan, listrik belum merata)	Perbaikan infrastruktur irigasi	Kelompok Tani
2	Ekonomi	3 masalah (pemasaran hasil pertanian, modal usaha, diversifikasi usaha)	Pengembangan BUMDes untuk pengelolaan hasil pertanian	Kelompok Wanita Tani dan PKK
3	Kesehatan	3 masalah (akses layanan kesehatan, sanitasi, stunting)	Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar	Kelompok Perempuan dan Lansia
4	Pendidikan & SDM	2 masalah (keterampilan pemuda, pendidikan anak usia dini)	Program pelatihan keterampilan bagi pemuda desa	Karang Taruna
5	Lingkungan	3 masalah (pengelolaan sampah, banjir, penggunaan pestisida berlebih)	Pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan	Kelompok Peduli Lingkungan

*Sumber: Data Hasil FGD Kegiatan Pengabdian, 2024*

Tabel 4 menunjukkan hasil identifikasi permasalahan dan program prioritas melalui FGD dalam kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024, dimana dari lima bidang pembangunan, infrastruktur memiliki permasalahan terbanyak (empat masalah), diikuti bidang ekonomi, kesehatan, dan lingkungan (masing-masing tiga masalah), serta pendidikan (dua masalah). Setiap bidang memiliki kelompok pengusul berbeda sesuai kepentingan dan keahlian, seperti Kelompok Tani yang memprioritaskan perbaikan irigasi, Kelompok Wanita Tani dan PKK mendorong

*JURNAL ABDIMAS SERAWAI VOL 5 No 1, APRIL 2025*

pengembangan BUMDes, dan Karang Taruna fokus pada pelatihan keterampilan pemuda desa. Keberhasilan FGD ini terlihat dari partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan, dengan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan seperti perempuan dan lansia kini memiliki suara dalam penentuan prioritas, terutama di bidang kesehatan, mengindikasikan pergeseran positif menuju perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif di tingkat desa.

#### **d) Simulasi Musyawarah Desa**

Sebagai puncak rangkaian kegiatan, tim pengabdian melakukan pendampingan simulasi musyawarah desa yang dihadiri perwakilan berbagai elemen masyarakat, perangkat desa, dan stakeholder lainnya, untuk melatih penerapan keterampilan dalam konteks formal, di mana peserta berlatih mempresentasikan hasil FGD, memberikan argumentasi berbasis data, menanggapi kritik secara konstruktif, dan berkompromi untuk mencapai konsensus. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas partisipasi dengan 85% peserta aktif memberikan pendapat dan usulan, meningkat drastis dari kondisi awal yang hanya 30%, mengindikasikan keberhasilan program dalam membangun kapasitas dan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam forum pengambilan keputusan pembangunan desa.

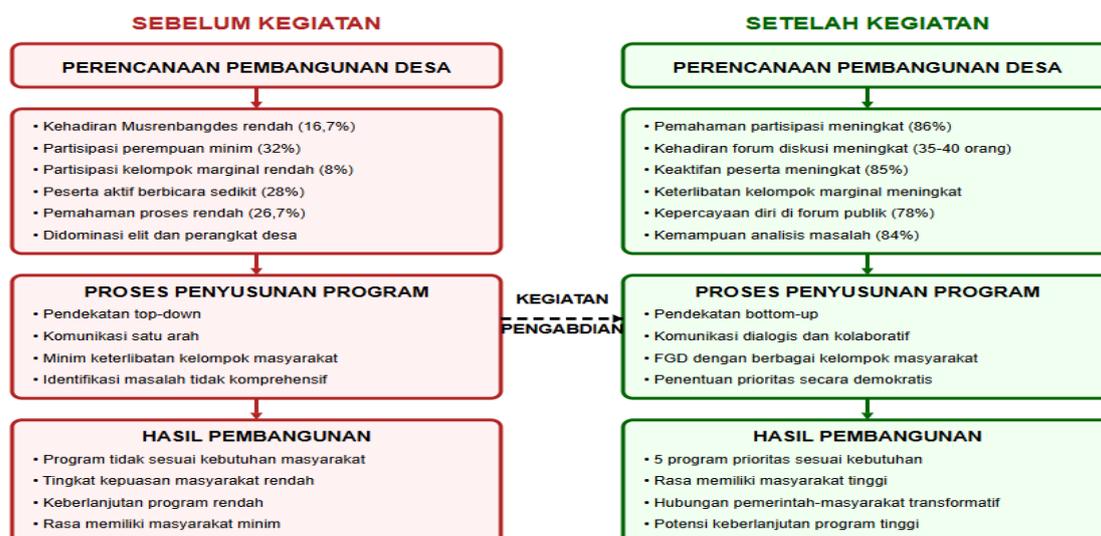
#### **e) Transformasi Hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat**

Salah satu hasil tidak langsung namun signifikan dari kegiatan ini adalah transformasi hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang berubah dari komunikasi satu arah dan formal menjadi lebih dialogis dan kolaboratif. Kepala Desa Cahaya Negeri, Bapak Ahmad Supriyadi, menyatakan komitmennya untuk terus menerapkan pendekatan partisipatif dalam setiap kebijakan dan program desa, mengakui bahwa pemerintahan desa akan lebih efektif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Perubahan positif ini juga terwujud dalam pembentukan Forum Komunikasi Desa, sebuah wadah informal yang memungkinkan terjadinya dialog berkala antara masyarakat dan pemerintah desa di luar forum formal seperti Musrenbangdes, memperkuat fondasi komunikasi dua arah dan kolaborasi dalam proses pembangunan desa.

### 3) Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cahaya Negeri berhasil mentransformasi proses perencanaan pembangunan desa secara signifikan, ditandai dengan peningkatan partisipasi dari sebelumnya hanya 16,7% menjadi forum-forum yang dihadiri 35-40 orang, keterlibatan aktif peserta meningkat dari 28% menjadi 85%, serta keterlibatan perempuan dan kelompok marginal yang jauh lebih besar. Perubahan fundamental terjadi dari pendekatan top-down menjadi bottom-up dengan komunikasi dialogis, menghasilkan lima program prioritas yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, dengan pembentukan Forum Komunikasi Desa sebagai faktor kunci keberlanjutan dan pemahaman pentingnya partisipasi yang meningkat hingga 86%, membuktikan efektivitas fasilitasi perencanaan partisipatif dalam menciptakan model pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun secara komperhensif dapat dilihat pada gambar berikut:



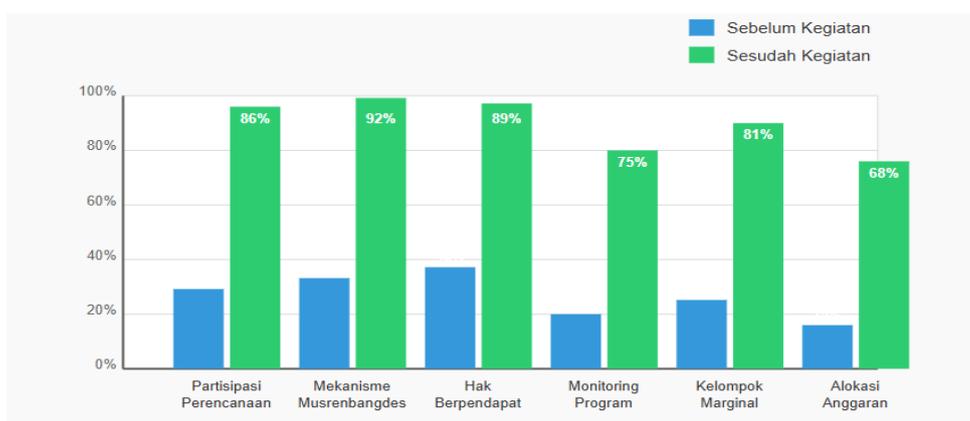
**Gambar 2.** Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cahaya Negeri telah menunjukkan transformasi signifikan dalam dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan kesadaran, kapasitas, dan mekanisme partisipasi yang terbangun memberikan landasan kuat untuk analisis mendalam tentang bagaimana fasilitasi perencanaan partisipatif dapat berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### a) Membangun Kesadaran Kritis tentang Partisipasi

Peningkatan kesadaran masyarakat Desa Cahaya Negeri dari 27% menjadi 86% menunjukkan keberhasilan pendekatan edukasi yang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anggraheni, 2022) yang menegaskan bahwa kesadaran kritis masyarakat merupakan prasyarat utama bagi partisipasi yang bermakna. Ketika masyarakat memahami peran dan hak mereka dalam proses pembangunan, mereka lebih cenderung untuk terlibat secara aktif.



**Gambar 3.** Perubahan Kesadaran Masyarakat sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian

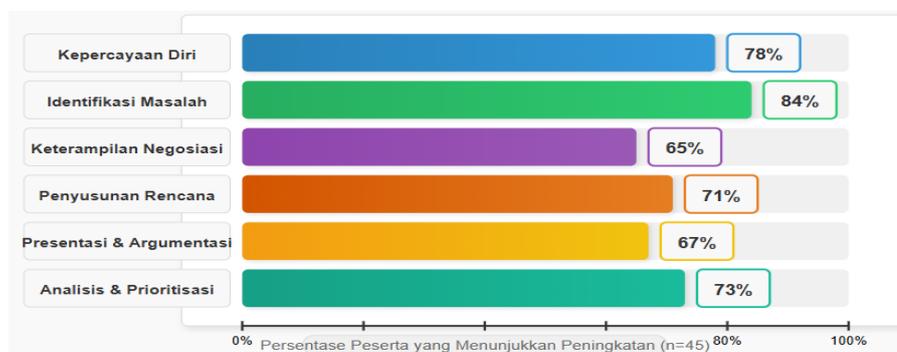
Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa peningkatan kesadaran terjadi pada semua aspek yang diukur, dengan peningkatan tertinggi pada pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan (59%) dan pemahaman peran masyarakat dalam monitoring program desa (57%). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang diterapkan berhasil membuka wawasan masyarakat tentang peran penting mereka dalam keseluruhan siklus pembangunan, tidak hanya dalam tahap perencanaan.

Namun, membangun kesadaran bukanlah proses instan. Seperti yang dikemukakan oleh (Freire, 2021), kesadaran kritis (*critical consciousness*) terbentuk melalui proses dialog dan refleksi berkelanjutan. Dalam konteks Desa Cahaya Negeri, peningkatan kehadiran masyarakat dalam forum diskusi dari 15-20 orang menjadi 35-40 orang menunjukkan proses penyadaran yang mulai membuahkan hasil. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa kesadaran ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang sering termarginalkan. Proses penyadaran ini juga menghadapi tantangan berupa kultur paternalisme yang masih kuat di masyarakat desa.

Banyak warga yang masih menganggap bahwa pembangunan adalah "urusan pemerintah". Perubahan mindset ini memerlukan waktu dan pendekatan yang konsisten, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan Bapak Sutrisno yang mulai menyadari pentingnya suaranya dalam pembangunan desa setelah mengikuti kegiatan.

#### b) Penguatan Kapasitas sebagai Katalisator Partisipasi Efektif

Hasil evaluasi yang menunjukkan 78% peserta melaporkan peningkatan kepercayaan diri berbicara di forum publik dan 65% telah menerapkan keterampilan negosiasi mengonfirmasi pentingnya pengembangan kapasitas sebagai landasan partisipasi efektif. Temuan ini memperkuat argumen (Chen, 2015) bahwa partisipasi yang bermakna memerlukan pemberdayaan masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.



**Gambar 4.** Peningkatan Kapasitas Partisipasi Masyarakat setelah Kegiatan Pengabdian

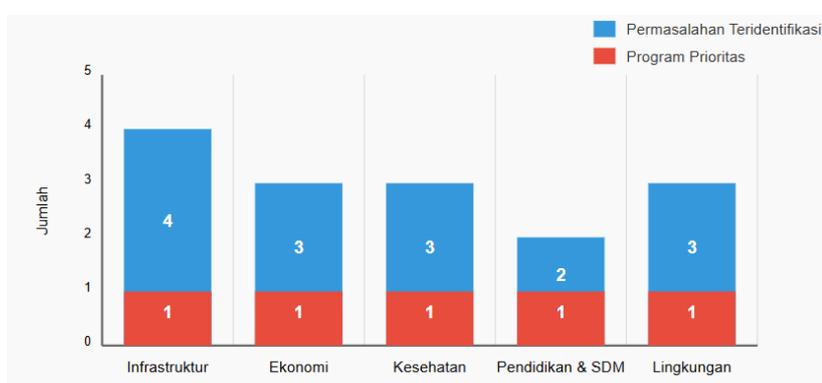
Gambar 4 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tertinggi terjadi pada kemampuan mengidentifikasi masalah secara sistematis (84%), diikuti oleh kepercayaan diri berbicara di forum publik (78%). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan kapasitas yang diterapkan berhasil meningkatkan keterampilan analitis dan komunikasi yang merupakan fondasi penting bagi partisipasi yang efektif.

Pengembangan kapasitas dalam kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek psikologis seperti kepercayaan diri dan agency. Pengalaman Ibu Mariani yang awalnya merasa malu untuk berbicara di forum publik mencerminkan hambatan psikologis yang sering dihadapi oleh perempuan dalam konteks partisipasi. Seperti yang dijelaskan oleh (Mosse, 2018), relasi gender dan norma sosial seringkali menjadi hambatan struktural bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Menghadapi tantangan ini, pendekatan pengembangan kapasitas yang sensitif gender dan inklusif menjadi sangat penting. Program pelatihan yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya terbukti efektif dalam mendorong partisipasi yang lebih luas dan beragam.

### c) Memfasilitasi Ruang Dialog yang Inklusif

Fasilitasi FGD dengan berbagai kelompok masyarakat telah menghasilkan identifikasi 15 permasalahan prioritas dan rencana aksi untuk lima program prioritas. Proses ini mencerminkan apa yang disebut Habermas sebagai "ruang publik" (public sphere) di mana warga dapat berdialog dan berdeliberasi tentang isu-isu bersama (Buechler, 1995).



**Gambar 4.** Perbandingan Jumlah Masalah Teridentifikasi dan Program Prioritas Per Bidang.

Gambar 4 menunjukkan bahwa bidang infrastruktur memiliki jumlah permasalahan teridentifikasi terbanyak (4 masalah), diikuti oleh bidang ekonomi, kesehatan, dan lingkungan (masing-masing 3 masalah). Namun, setiap bidang menghasilkan 1 program prioritas, yang menunjukkan bahwa proses prioritasasi dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan di semua sektor.

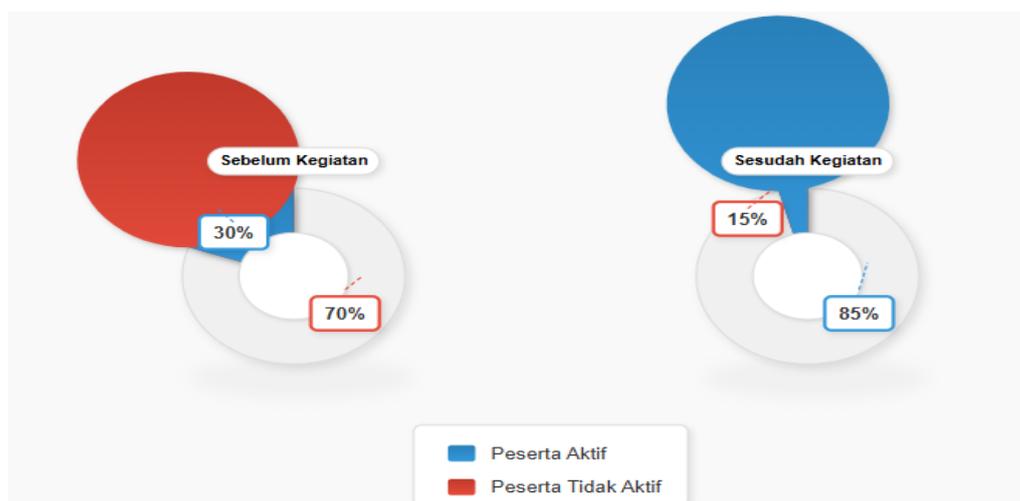
Penciptaan ruang dialog yang inklusif merupakan aspek krusial dalam perencanaan partisipatif. Kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta, tetapi juga oleh representasi dari berbagai kelompok kepentingan dan kualitas deliberasi yang terjadi. Dalam konteks Desa Cahaya Negeri, upaya khusus untuk memastikan keterwakilan kelompok perempuan, pemuda, petani, dan kelompok marginal dalam FGD mencerminkan komitmen terhadap inklusi sosial.

Namun, tantangan tetap ada dalam menjembatani kesenjangan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh (Caiani, 2023)

dalam kritik mereka terhadap partisipasi sebagai "tirani baru", proses partisipatif yang tidak dirancang dengan hati-hati dapat justru mereproduksi relasi kekuasaan yang ada dan mengabaikan suara kelompok marginal. Dalam kegiatan ini, penggunaan berbagai teknik fasilitasi seperti metode "World Café" dan "Nominal Group Technique" bertujuan untuk meminimalkan dominasi dan memastikan bahwa semua suara dapat didengar.

#### d) Simulasi sebagai Pembelajaran Eksperiensial

Simulasi musyawarah desa yang menunjukkan peningkatan peserta aktif dari 30% menjadi 85% menegaskan efektivitas pembelajaran eksperiensial dalam membangun kapasitas. Temuan ini sejalan dengan prinsip pendidikan orang dewasa (andragogi) yang menekankan pentingnya praktik langsung dan refleksi dalam proses pembelajaran (Wong, 2015).



**Gambar 5.** Perbandingan Tingkat Partisipasi Aktif dalam Forum (sebelum dan Setelah Kegiatan)

Gambar 5 menunjukkan peningkatan drastis dalam tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam forum desa dari 30% menjadi 85%, membuktikan efektivitas kombinasi pendekatan penguatan kesadaran, pengembangan kapasitas, dan pembelajaran eksperiensial melalui simulasi yang menyediakan ruang aman bagi peserta untuk berlatih tanpa konsekuensi nyata. Meskipun simulasi terbukti efektif membantu peserta memahami prosedur formal dan dinamika kekuasaan dalam musyawarah desa, situasi nyata memiliki kompleksitas lebih tinggi yang sulit direplikasi, sehingga pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keterampilan yang dipelajari dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pembangunan desa yang sebenarnya.

### **e) Transformasi Hubungan Pemerintah-Masyarakat**

Salah satu hasil yang paling signifikan dari kegiatan ini adalah transformasi hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat menuju komunikasi yang lebih dialogis dan kolaboratif. Perubahan ini mencerminkan apa yang disebut Gaventa (2016) sebagai "pemerintahan yang responsif" (responsive governance), di mana pemerintah dan warga berkolaborasi dalam menentukan arah pembangunan (Pramono & Suranto, 2022).

Pembentukan Forum Komunikasi Desa sebagai wadah dialog informal merupakan langkah konkret dalam melembagakan ruang partisipasi. Seperti yang dijelaskan oleh (Arai et al., 2021) dalam model "Empowered Participatory Governance", pelembagaan ruang partisipasi penting untuk memastikan keberlanjutan praktik partisipatif di luar intervensi tertentu.

Pernyataan Kepala Desa yang mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat menunjukkan perubahan mindset yang penting di tingkat kepemimpinan. Seperti yang dijelaskan oleh (Cornwall & Coelho, 2007), komitmen politik elit lokal merupakan faktor kunci keberhasilan inisiatif partisipatif. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa komitmen ini dapat dipertahankan dan diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

### **f) Dampak Terhadap Keberlanjutan Pembangunan Desa**

Keberhasilan fasilitasi perencanaan partisipatif di Desa Cahaya Negeri berpotensi memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pembangunan desa dalam jangka panjang. Program prioritas yang dihasilkan dari proses partisipatif cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memiliki dukungan masyarakat yang lebih kuat. Selain itu, proses partisipatif juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya.

Meskipun demikian, seperti yang diingatkan oleh (Husmayanti, 2021a), keberhasilan perencanaan partisipatif tidak hanya bergantung pada kualitas proses di tingkat lokal, tetapi juga pada dukungan struktural dan institusional di tingkat yang lebih tinggi (Winarti et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, dengan struktur desentralisasi yang kompleks, perlu ada sinergi antara proses partisipatif di tingkat desa dan kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

### **g) Refleksi Kritis: Keterbatasan dan Pembelajaran**

Meskipun kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang positif, penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap keterbatasan yang ada. Pertama, waktu pelaksanaan yang relatif singkat (tiga bulan) membatasi kedalaman intervensi dan potensi dampak jangka panjang. Kedua, meskipun upaya telah dilakukan untuk memastikan inklusi, masih ada kelompok masyarakat yang mungkin belum terjangkau secara optimal, seperti penyandang disabilitas dan lansia.

Selain itu, tantangan struktural seperti keterbatasan anggaran desa, kapasitas teknis perangkat desa, dan kerangka regulasi yang kompleks perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi potensi keberlanjutan inisiatif ini. Seperti yang dikemukakan oleh (Faradila & Lutfi, 2020), intervensi pemberdayaan masyarakat perlu mempertimbangkan realitas sosial-politik yang lebih luas di mana intervensi tersebut berlangsung.

Pembelajaran utama dari kegiatan ini adalah pentingnya membangun kapasitas sambil secara simultan menciptakan ruang partisipasi yang bermakna. Kapasitas tanpa ruang dapat menimbulkan frustrasi, sementara ruang tanpa kapasitas dapat menghasilkan partisipasi yang dangkal atau simbolis. Pendekatan terpadu yang menghubungkan penguatan kesadaran, pengembangan kapasitas, dan penciptaan mekanisme partisipatif terbukti efektif dalam konteks Desa Cahaya Negeri.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kegiatan fasilitasi perencanaan partisipatif di Desa Cahaya Negeri telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses perencanaan. Peningkatan kesadaran masyarakat dari 27% menjadi 86%, peningkatan kepercayaan diri berbicara di forum publik sebesar 78%, dan peningkatan partisipasi aktif dalam simulasi musyawarah desa dari 30% menjadi 85% menunjukkan efektivitas pendekatan yang diterapkan. Hasil lain yang signifikan adalah transformasi hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih dialogis dan kolaboratif, yang tercermin dalam pembentukan Forum Komunikasi Desa sebagai wadah dialog berkelanjutan. Kegiatan ini telah

meletakkan dasar bagi praktik perencanaan partisipatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Desa Cahaya Negeri.

### Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cahaya Negeri, perlu adanya keberlanjutan upaya penguatan partisipasi melalui pelembagaan mekanisme perencanaan partisipatif dalam sistem pemerintahan desa, didukung alokasi anggaran khusus untuk Forum Komunikasi Desa. Masyarakat desa perlu mempertahankan momentum partisipasi aktif dengan mengembangkan sistem pemantauan berbasis komunitas untuk mengawasi implementasi program-program yang telah disepakati bersama. Pemerintah Kabupaten Seluma sebaiknya mengadopsi model fasilitasi yang telah terbukti efektif ini untuk diterapkan di desa-desa lain, serta menciptakan regulasi yang mendukung sinergi antar level perencanaan. Bagi pengabdian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan program dengan durasi lebih panjang, mengintegrasikan teknologi digital untuk memperluas jangkauan partisipasi, dan menggabungkan pendekatan perencanaan partisipatif dengan pengembangan ekonomi lokal untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan desa secara menyeluruh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono, P., Shankar, A. H., Thabrany, H., Susiloretni, K. A., Soewondo, P., Ahmad, S. A., Kurniawan, M., Hidayat, B., Pardede, D., Mundiharno, ... Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. In *The Lancet* (Vol. 393, Issue 10166). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)
- Aguswan, S. Z., & Mirad, A. (2018). Data and Information Mapping Of Participatory Plan for Village Development. In *International Journal of Scientific and ... researchgate.net*. [https://www.researchgate.net/profile/Sulaiman-Zuhdi/publication/327444002\\_Data\\_and\\_Information\\_Mapping\\_Of\\_Participatory\\_Plan\\_for\\_Village\\_Development/links/60533d47a6fdccbfeaebfac5/Data-and-Information-Mapping-Of-Participatory-Plan-for-Village-Development](https://www.researchgate.net/profile/Sulaiman-Zuhdi/publication/327444002_Data_and_Information_Mapping_Of_Participatory_Plan_for_Village_Development/links/60533d47a6fdccbfeaebfac5/Data-and-Information-Mapping-Of-Participatory-Plan-for-Village-Development).
- Anggraheni, S. (2022). *Transformasi Kelembagaan Desa Menuju Smart Village Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Di Ekowisata ....* [eprints.umm.ac.id. https://eprints.umm.ac.id/86581/](https://eprints.umm.ac.id/86581/)
- Arai, Y., Maswadi, Oktoriana, S., Suharyani, A., Didik, & Inoue, M. (2021). How can we mitigate power imbalances in collaborative environmental governance? Examining the role of the village facilitation team approach observed in west Kalimantan, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(7).

- <https://doi.org/10.3390/su13073972>
- Bihanding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. books.google.com.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ngjFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=perencanaan+desa&ots=RHkCYPmoH1&sig=PaMU9CqsJ41BKY65HcU08Kv6fS0>
- Buechler, S. M. (1995). NEW SOCIAL MOVEMENT THEORIES. *Sociological Quarterly*, 36(3). <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1995.tb00447.x>
- Caiani, M. (2023). Framing and social movements. *Discourse Studies*, 25(2). <https://doi.org/10.1177/14614456231154734>
- Chambers, R. (2014). Rural Development: Putting the last first. In *Rural Development: Putting the last first*. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- Chen, M. (2015). Public Participation in Environmental Management in China: Status Quo and Mode Innovation. *Environmental Management*, 55(3), 523–535. <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0428-2>
- Cornwall, A., & Coelho, V. S. P. (2007). Spaces for change?: the politics of citizen participation in new democratic arenas. *Spaces for Change?: The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas*.
- Faradila, M., & Lutfi, A. (2020). Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 75. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1762>
- Freire, P. (2021). Education for Critical Consciousness. In *Education for Critical Consciousness*. <https://doi.org/10.5040/9781350190184>
- Husmayanti, R. (2021a). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial* ....  
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/479>
- Husmayanti, R. (2021b). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial* ....  
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/479>
- Ife, J. (2014). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*.
- Laily, E. I. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. In *Jurnal Kebijakan dan Manajemen* ....  
[journal.unair.ac.id. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmpe7137ee51bfull.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmpe7137ee51bfull.pdf)
- Mosse, D. (2018). Caste and development: Contemporary perspectives on a structure of discrimination and advantage. In *World Development* (Vol. 110, pp. 422–436). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.003>
- Mustanir, A., Ibrahim, M., Sapri, S., & ... (2020). Participatory rural appraisal: Transect dan matriks budidaya pertanian dalam pemberdayaan masyarakat penyiapan kebun bibit desa. *JMM (Jurnal* ....  
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/2864>

- Pramono, J., & Suranto, J. (2022). Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Abdimas Serawai*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.3007>
- Prayitno, G. (2022). *Perencanaan Desa Terpadu*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BillEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=perencanaan+desa&ots=rjDkcwQFNW&sig=aSkx4IBIGxabim8y6OoyOpbdBt4>
- Putri, A. R. L. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1003>
- Setiawan, W. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. repository.uin-suska.ac.id. <http://repository.uin-suska.ac.id/21495/>
- Setyawan, D., Nugraha, A. L., & ... (2018). Analisis potensi desa berbasis sistem informasi geografis (studi kasus: Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/22401>
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*. <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/view/1181>
- Soleh, A. (2019). Village-Owned Enterprises (BUM Desa) For Inclusive Growth In Bengkulu Province. *The 1st Workshop on Multimedia Education, Learning ....* <https://doi.org/10.4108/eai.26-1-2019.2283325>
- Sondakh, J., Rembang, J. H. W., & Syahyuti, N. (2021). Karakteristik, Potensi Generasi Milenial dan Perspektif Pengembangan Pertanian Presisi di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2). <https://doi.org/10.21082/fae.v38n2.2020.155-166>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan ....* <https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120>
- Winarti, Aris Triharyanto, & Budiman Widodo. (2022). Pendampingan Pengelolaan Potensi Desa Oleh Masyarakat di Desa Puntuk Rejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Abdimas Serawai*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.4600>
- Wong, M. L. (2015). Seasonal and Spatial Dynamics of the Primary Vector of Plasmodium knowlesi within a Major Transmission Focus in Sabah, Malaysia. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 9(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004135>
- Yogopriyatno Jatmiko, Nursanty, & Hardayani, Y. (2022). Governance Leverage Development Agile Adaptive Tourism Village Design in Kemumu. In S. A. dan P. D. Y. Asmorowati (Ed.), *Promoting Adaptive System to the Current Turbulence within Crisis Environments* (pp. 54–79). Airlangga University Press.

[https://drive.google.com/file/d/1D\\_dvY9VP\\_mE7vhr\\_Alm5znAckjjb08K/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/1D_dvY9VP_mE7vhr_Alm5znAckjjb08K/view?usp=drivesdk)